

# Nawala SMERU

EDISI KHUSUS KERJA SAMA DENGAN DAERAH

*Nawala SMERU* memberi Anda informasi terkini tentang penelitian, publikasi, dan kolaborasi terbaru SMERU. Telusuri *Nawala SMERU* edisi lainnya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan dari riset-riset SMERU.



## Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Selamat datang pada *Nawala SMERU* edisi khusus yang menyoroti kolaborasi SMERU dengan pemerintah daerah.

Kolaborasi dalam penelitian terbukti mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Melalui sinergi dengan pengambil kebijakan di tingkat daerah, temuan penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang efektif untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Nawala edisi khusus ini menyajikan kolaborasi yang pernah kami lakukan bersama sejumlah pemerintah daerah. Bentuk kerja sama yang kami lakukan beragam, antara lain mencakup penelitian,

pemantauan dan evaluasi, bantuan teknis, komunikasi kebijakan serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengambil kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Kami berharap nawala ini dapat bermanfaat bagi praktisi pembangunan, lembaga donor, dan pembuat kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Nantikan *Nawala SMERU* edisi khusus selanjutnya!

*Widjajanti Isdijoso*

**Direktur**  
**The SMERU Research Institute**



## Tentang SMERU

## Lebih dari 20 Tahun Mendukung Pemerintah Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti

The SMERU Research Institute (SMERU) adalah sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan. Ruang lingkup pekerjaan kami mencakup berbagai isu sosial-ekonomi, terutama yang berperspektif kemiskinan dan ketimpangan. SMERU secara resmi didirikan pada 2001 dan memiliki visi terwujudnya masyarakat Indonesia dan dunia yang terbebas dari berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan melalui dukungan penelitian untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Selain melakukan penelitian, SMERU berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendiseminasikan hasil penelitian maupun melakukan peningkatan kapasitas. Layanan utama SMERU adalah penelitian, pemantauan dan evaluasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan komunikasi kebijakan. Hasil penelitian SMERU telah digunakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.

Di tingkat pusat, SMERU mendukung Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan yang diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014–2019, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan *Roadmap* Menuju Kemiskinan 0% di Indonesia 2045. Pada 2023, SMERU bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan UNFPA) dalam memperbarui Indeks Pembangunan Pemuda.

Di tingkat daerah, SMERU membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Kota Bogor menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, memberi dukungan teknis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra, dan bekerja sama menyusun kebijakan penurunan kemiskinan daerah berbasis bukti melalui Forum Pembangunan Daerah Jawa Timur.

## SMERU Learning Centre

## Meningkatkan Kapasitas Pembuat Kebijakan melalui Pelatihan

SMERU Learning Centre adalah wadah belajar penelitian dan perumusan kebijakan sosial-ekonomi. Melalui wadah ini, SMERU berusaha mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan berbasis hasil penelitian. Layanan SMERU Learning Centre terdiri dari Regular Training, E-Learning, dan Customized Training. Regular Training adalah pelatihan untuk umum dan diselenggarakan secara daring. Materi pelatihan Regular Training di antaranya penyusunan catatan kebijakan

(*policy brief*), pengantar evaluasi dampak, dan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Customized Training adalah program pelatihan yang topik serta jadwalnya dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu lembaga.

Kami siap membantu Anda meningkatkan kapasitas staf dalam hal riset kebijakan atau analisis kemiskinan. Hubungi kami: **0812 8386 8447** atau [slclab@smeru.or.id](mailto:slclab@smeru.or.id).

## Penelitian SMERU

### Mewujudkan Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten Kayong Utara (KKU) memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada 2011–2019, yaitu rata-rata 5,34%. Meskipun demikian, skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) kabupaten ini pada 2021 rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat. Skor IPEI menggambarkan tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang seyogyanya diiringi kemiskinan dan ketimpangan yang rendah.

Pada 2021, SMERU melakukan studi yang menganalisis penyebab rendahnya skor IPEI KKU. SMERU melakukan analisis



deskriptif terhadap sejumlah indikator IPEI serta melakukan *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan wawancara kelompok dengan pemangku kepentingan terpilih di KKU.

Studi SMERU menemukan rendahnya inklusivitas pembangunan di KKU disebabkan oleh infrastruktur pendukung perekonomian yang belum memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. Karena akses jalan yang sulit di KKU, masyarakat di wilayah kepulauan lebih memilih menyekolahkan anak mereka di luar daerah atau tidak menyekolahkan mereka.

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, Pemerintah KKU dapat melakukan upaya jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu upaya jangka pendek yaitu mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif sebagai arah kebijakan pembangunan di KKU. Upaya jangka panjang misalnya mendorong sistem pendidikan menengah ke atas yang berbasis asrama, khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir, dan mengoptimalkan skema Kartu Indonesia Pintar yang memberikan jaminan pendidikan bebas biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin.

## Komunikasi Kebijakan

### Forum Pembangunan Daerah: Kerja Sama SMERU dan Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan

Sejak 2016, SMERU menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD) untuk memperluas jangkauan diseminasi hasil penelitiannya. Forum yang mendiskusikan hasil riset dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ini mempertemukan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain di tingkat nasional dan daerah seperti akademisi, lembaga donor, lembaga non-pemerintah, praktisi, sektor swasta, dan pakar isu-isu pembangunan.

Pemerintah daerah yang pernah menjadi mitra SMERU dalam menyelenggarakan FPD yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat,



Kota Surakarta (Jawa Tengah), Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Topik-topik FPD di antaranya tantangan pemerintah daerah mengatasi kemiskinan dan strategi pembangunan ekonomi inklusif.

Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam pengentasan kemiskinan



dan ketimpangan. Namun, upaya tersebut tidak bisa diwujudkan sendiri oleh pemerintah daerah karena kemiskinan adalah isu yang kompleks dan bersifat multidimensi. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintahan sangat penting untuk merealisasikan pembangunan yang dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di berbagai wilayah.



## Bantuan Teknis



### SMERU Mendukung Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RPKD

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas nasional. Oleh karenanya, setiap daerah perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat strategi, program dan kegiatan yang dirancang khusus untuk mengatasi kemiskinan. RPKD berperan dalam menerjemahkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks lokal.



Pada 2021, SMERU memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyusunan RPKD yang memuat perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan. Sementara, pada 2024, SMERU mendukung Pemerintah Kota Bogor menyusun RPKD dengan melakukan tinjauan dokumen, analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif.



### Membangun Sistem DTKS yang Akurat dan Berkelanjutan

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan strategi nasional. Pada 2022, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan SMERU dalam mengembangkan DTKS yang mutakhir, akurat, mudah diakses serta dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Pengembangan DTKS ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran. SMERU memberi dukungan kepada TKPK Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan evaluasi variabel dan model untuk pemeringkatan kesejahteraan dalam rangka pengembangan DTKS daerah.



### Kerja Sama SMERU dengan Pemerintah Daerah: Mengkaji Inovasi Kebijakan Pendidikan

Pemerintah kabupaten/kota berwenang menciptakan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing. Melalui Program RISE di Indonesia (2017–2022), SMERU menjalin kerja sama dengan dinas pendidikan di dua kota, satu kabupaten, dan satu provinsi dalam mengkaji inovasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Di Yogyakarta, SMERU mengkaji dampak awal kebijakan penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi. Di Bukittinggi, SMERU membantu mengembangkan instrumen tes seleksi guru honorer. Di Kebumen, SMERU membantu merancang dan menerapkan program peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak. Di DKI Jakarta, SMERU membantu merancang reformasi dalam pengembangan profesi guru. Tim peneliti SMERU secara aktif berdiskusi dengan staf dinas pendidikan di daerah-daerah tersebut untuk mencari tahu akar masalah pendidikan dan menemukan solusinya—yang bisa jadi berbeda antardaerah.